

DAFTAR PUSTAKA

- Asian Development Bank. (2020). Public-private partnership monitor: Indonesia. Asian Development Bank.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Wondama. (2025). Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Wondama. (2025). Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2020–2025. Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Teluk Wondama. (2025). Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
- Badaru, M. I. (2022). Perencanaan tata ruang wilayah dan pembangunan berkelanjutan. Prenadamedia Group.
- Bird, R. M., dan Smart, M. (2002). Intergovernmental fiscal transfers: International lessons for developing countries. *World Development*, 30(6), 899–912.
- Burgess, M. G. (2018). Blue growth and ocean finance. *Marine Policy*, 87, 72–82.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Dahri, A., dan Rusli, A. (2023). Planning consistency analysis dan palopo city government budgeting year 2016–2020. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 5(2), 176–183.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Teluk Wondama. (2021). Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2021–2026. Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
- Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Teluk Wondama. (2021). Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2021–2026. Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
- Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Wondama. (2021). Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2021–2026. Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Teluk Wondama. (2021). Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2021–2026. Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Teluk Wondama. (2021). Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2021–2026. Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.

- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Febriyanti, I., dan Mildawati, T. (2017). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, **6**(12), 1-17.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Handayani, W., Rahayu, S., dan Nugroho, A. (2020). Implementasi RTRW berbasis lingkungan di kawasan timur indonesia. *Jurnal Tata Ruang Nusantara*, **12**(2), 145–162.
- Hersperger, A. M., Oliveira, E., Pagliarin, S., Palka, G., Verburg, P., Bolliger, J., dan Grădinaru, S. (2019). Urban land-use change: The role of spatial planning. *Land Use Policy*, **86**, 366–375.
- Hidayat, T., Permatasari, M. D., dan Aeni, P. (2024). Pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, dan kinerja keuangan terhadap belanja modal Jawa Barat. *AKUBIS: Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, **9**(1), 105–115.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2023). *Pedoman Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah*. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Kebijakan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Khan, M., Serafeim, G., dan Yoon, A. (2021). Corporate sustainability: First evidence on materiality. *The Accounting Review*, **96**(4), 169–200.
- Kuncoro, M. (2018). *Perencanaan pembangunan daerah: Teori dan aplikasi*. UPP STIM YKPN.
- Kurniati, P. S., dan Suryanto. (2021). Financing model for infrastructure development in autonomic regions. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, **7**(2), 99–109.
- Machmud, S. (2015). Kajian pemanfaatan dana corporate social responsibility sebagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, **21**(3), 201–215.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen kinerja sektor publik*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Martland, C. D. (2011). *Toward more sustainable infrastructure: Project evaluation for planners dan engineers*. Wiley.
- Muta'ali, L. (2015). *Teknik analisis regional untuk perencanaan wilayah, tata ruang dan lingkungan*. Badan Penerbit Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.
- Oktanidya, K. S. (2024). The implementation of planning and budgeting system redesign in efforts to reform planning dan budgeting. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, **5**(8), 3190–3209.
- Ozturk, I., dan Acaravci, A. (2023). Green finance, renewable energy, and economic growth nexus. *Energy economics*, **117**, 106457.
- Pearce, D. (2021). *Economics of sustainable development*. Routledge.
- Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2012–2031. Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.

- Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2005–2025. Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
- Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2021–2025. Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Pemerintah Pusat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pekasanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua. Pemerintah Pusat.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Pemerintah Pusat.
- Prasetyo, R. B., dan Firdaus, M. (2009). Pengaruh infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi wilayah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 2(2), 222–236.
- Rahmanto, D. (2021). Model pembiayaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, 9(2), 75–92.
- Rianawati, F., Nugraha, A., dan Putra, R. (2024). Blue financing as a driver of sustainable coastal development. *Marine economics review*, 11(1), 34–49.
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., dan Panuju, D. R. (2018). Perencanaan dan pengembangan wilayah. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Santoso, B. (2019). Corporate social responsibility dan pembangunan daerah. *Jurnal Manajemen Publik*, 5(1), 41–56.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sutaryono. (2018). Tata ruang dan pembangunan berkelanjutan. STPN Press.
- Tarigan, R. (2017). Perencanaan pembangunan wilayah. Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pemerintah Pusat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pemerintah Pusat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pemerintah Pusat.

United Nations. (2020). The Sustainable Development Goals Report 2020. United Nations.

World Bank. (2020). Indonesia Public Expenditure Review. World Bank.

Yuliani, R., dan Nugroho, S. (2023). Kemitraan publik-swasta dalam pembangunan infrastruktur daerah. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, **8**(1), 25–40.

Yunus, H. S. (2005). Manajemen Kota: Perspektif spasial. Pustaka Pelajar.